



Pemerintah
Kabupaten Mempawah



Renstra

(RENCANA STRATEGIS)
2025-2029

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MEMPAWAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.



Mempawah, 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mempawah

HAMDANI, ST

NIP. 19670818 199403 1 008

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	33
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.2.2 Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	67
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	131
BAB V PENUTUP	135
5.1 Kesimpulan	135
5.2 Kaidah Pelaksanaan	135
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	136



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan	32
Tabel 2.5	Mitra Perangkat Daerah	33
Tabel 2.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	34
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	35
Tabel 2.8	Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	42
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah	49
Tabel 3.2	Penentuan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah	56
Tabel 3.3	Arah Kebijakan	61
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	63
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	68
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah OPD	88
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	130
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	132
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataang Ruang Kabupaten Mempawah	11
Gambar 2.2	Capaian Kinerja Utama Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik (Persen)	20
Gambar 2.3	Capaian Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 ltr Perorang Perhari (Persen).....	21
Gambar 2.4	Capaian Kinerja Utama Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan (Persen).....	22
Gambar 2.5	Capaian Kinerja Utama Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Persen)	23
Gambar 2.6	Capaian Kinerja Utama Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Persen).....	24
Gambar 2.7	Capaian Kinerja Utama Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan (Persen).....	26
Gambar 3.1	Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal,

penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2029, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.1106), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2.1.5 Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemberian Pelayanan (jika ada);
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (jika ada); dan
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (jika ada).
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah dan 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah memiliki tugas melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pembinaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur;

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
 4. Bidang Cipta Karya, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Pembangunan Gedung;
 - Seksi Pemeliharaan Gedung;
 5. Bidang Sumber Daya Air, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 - Seksi Irigasi dan Air Baku;
 - Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai;
 6. Bidang Tata Ruang, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - Seksi Pengendalian Ruang;

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 memiliki tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sebagai berikut:

Memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah memiliki tugas pokok menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas tugas Bidang; pengelolaan administrasi keuangan; pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana; pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan; pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga dinas; pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran dinas; pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah memiliki tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian menjalankan fungsi sebagai berikut:

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana, perlengkapan, rumah tangga dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga di bidang pembangunan jalan dan jembatan dan Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Bina Marga di bidang Pemeliharaan jalan dan jembatan.

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Cipta Karya, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya di bidang Pembangunan Gedung

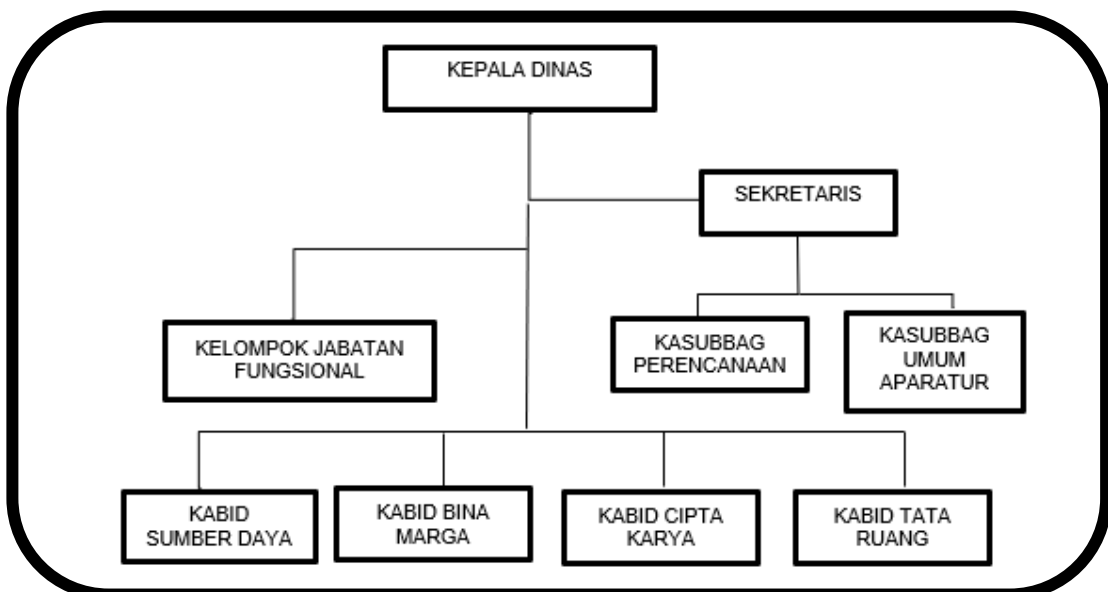
serta Seksi Pemeliharaan Gedung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya di bidang Pemeliharaan Gedung.

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Sumber Daya Air, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Sumber Daya Air di bidang irigasi dan air baku serta Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Sumber Daya Air di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Tata Ruang, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Tata Ruang dibidang Pemanfaatan Ruang dan Seksi Pengendalian Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Tata Ruang di bidang Pengendalian Ruang.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan – undangan.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kota Kabupaten Mempawah Nomor 81 Tahun tentang 2021, disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 *Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah*

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** memiliki 65 pegawai PNS dan 3 Pegawai PPPK. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. Eselon IV : 5 Orang
4. Pejabat fungsional : 54 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui

pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebanyak **65 orang PNS dan 3 orang PPPK** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Magister S-2 : 3 Orang
2. Sarjana S-1 : 25 Orang
3. Diploma 4 : 1 Orang
4. Diploma 3 : 7 Orang
5. SMA Sederajat : 27 Orang
6. SLTP Sederajat : 5 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang **SMA Sederajat**, yang mencerminkan **keterbatasan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. **Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.**

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah** dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 5 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 9 Orang

3. Usia 40–49 tahun : 24 Orang
4. Usia \geq 50 tahun : 30 Orang

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia \geq 50 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini **mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai / menuntut perhatian dalam perencanaan pensiun dan penggantinya**. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Meja $\frac{1}{2}$ biro	Layak		80
2	Kursi	Layak		100
3	Meja Rapat	Layak		9
4	Meja 1 Biro	Layak		6
5	Kursi Rapat	Layak		50
6	Kursi Tunggu Stainlis	Layak		3
7	Kursi Putar	Layak		10
8	GPS	Layak		1
9	Meja Gambar	Layak		3
10	Drone		Tidak Layak	1
11	Lemari	Layak		6
12	Komputer	Layak		23
13	Telpon	Layak		1
14	AC	Layak		19

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
15	Brankkas	Layak		1
16	Filling Kabinet	Layak		4
17	Lemari Besi	Layak		2
18	Laptop	Layak		4
19	Dep Slump Tes	Layak		1
20	Printer Ink Jet Canon	Layak		1
21	Printer LQ 2190	Layak		1
22	Printer Canon IP 100 Portable	Layak		4
23	Printer Ink Jet	Layak		4
24	Printer Desk Jet All In One	Layak		1
25	Mesin Chainsaw	Layak		3
26	Mesin Pompa Air	Layak		1
27	Proyektor		Tidak Layak	1
28	Layar Proyektor	Layak		1
29	Faximili		Tidak Layak	1
30	Peralatan Sound System	Layak		1
31	Tong Sampah TPS Fibre	Layak		122
32	Gorden	Layak		1
33	Kamera	Layak		1
34	Vacum Cleaner		Tidak Layak	1
35	Tenda	Layak		2
36	Tempat Sampah Stainless	Layak		2
37	Televisi		Tidak Layak	1
38	Eskavator	Layak		1
39	Kendaraan Roda 2	Layak		21
40	Kendaraan Roda 3	Layak		1
41	Kendaraan Roda 4	Layak		5

Sumber: Data Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah** berada dalam kondisi **tidak layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, **serta** pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)															
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	54,18	59,40	61,90	60,95	61,75	57,75	60,30	59,10	60,95	41,40	106,59	101,52	95,48	100,00	67,04
2	Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik	80,00	53,00	56,00	70,00	76,10	80,00	53,00	56,00	70,00	76,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 ltr Perorang Perhari	62,00	62,00	63,00	72,00	75,31	61,06	62,09	63,73	73,42	76,04	98,48	100,15	101,16	101,97	100,97
4	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	0	68,90	80,00	85,00	88,20	0	79,09	80,07	86,74	88,55	0	114,79	100,09	102,05	100,40
5	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan	2,04	23,10	24,27	25,45	26,67	0,27	23,10	24,27	25,45	26,67	13,24	100,00	100,00	100,00	100,00

6	Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	10,00	20,00	30,00	33,33	45,00	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00
	IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)															
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	14,09	14,14	14,19	14,24	14,29	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	100,00	99,64	99,29	98,94	98,60
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	63,64	63,69	63,74	63,79	63,84	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64	100,00	99,92	99,84	99,76	99,68
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,92	23,10	24,27	25,45	26,67	21,92	23,10	24,27	25,45	26,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	62,00	62,00	63,00	72,00	75,31	61,06	62,09	63,73	73,42	76,04	98,48	100,15	101,16	101,97	100,97
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	68,90	80,00	85,00	88,20	-	79,09	80,07	86,74	88,55	-	114,79	100,09	102,05	100,40

6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	54,18	59,40	61,90	60,95	61,75	57,75	60,30	59,10	60,95	41,40	106,58	101,52	95,48	100,00	67,04
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang telah disusun	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	10,00	20,00	30,00	33,33	45,00	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan, LPPD dan Renstra DPUPR Kab. Mempawah Tahun 2020-2024

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, jika dilihat dari hasil capaian pada indikator kinerja Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik, Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 ltr Perorang Perhari, Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan dan Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang selama 5 tahun masa Renstra menunjukkan hasil yang berfluktuatif naik dan turun.



Gambar 2.2 Capaian Kinerja Utama Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik (Persen)

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, persentase bangunan gedung yang dibangun dalam kondisi baik secara konsisten berada pada angka **100%** setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pembangunan gedung selama periode tersebut telah memenuhi standar kualitas konstruksi yang baik dan layak. Konsistensi capaian ini mencerminkan komitmen dan kinerja yang optimal dari instansi terkait dalam memastikan mutu pembangunan infrastruktur gedung negara. Selain itu, pencapaian ini juga menjadi indikator bahwa proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi teknis yang berlaku.

Ke depan, penting untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas tersebut, tidak hanya dalam aspek konstruksi fisik, tetapi juga dalam pemeliharaan rutin guna mempertahankan kondisi bangunan tetap baik dalam jangka panjang.



Gambar 2.3 Capaian Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan Kebutuhan Pokok Minimal 60 ltr Perorang Perhari (Persen)

Grafik menunjukkan perkembangan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum (baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan yang terlindungi) dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari selama periode 2020 hingga 2024.

Pada tahun **2020**, capaian berada di angka **98,48%**, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah mendapatkan akses air minum yang aman. Capaian ini meningkat pada tahun **2021** menjadi **100,15%**, yang berarti jumlah penduduk yang dilayani telah memenuhi bahkan sedikit melebihi target kebutuhan pokok air harian.

Tren peningkatan berlanjut pada tahun **2022** dengan capaian **101,16%**, dan mencapai angka tertinggi pada tahun **2023** sebesar **101,97%**. Hal ini menunjukkan efektivitas program penyediaan air minum yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pada tahun **2024**, capaian sedikit menurun menjadi **100,97%**, namun tetap berada di atas angka 100%, menandakan pelayanan yang masih sangat baik dan merata.

Secara keseluruhan, tren lima tahun terakhir mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas air minum aman bagi penduduk. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan layanan ini dengan tetap memperhatikan kualitas, kapasitas, serta keberlangsungan sumber daya air yang ada.



Gambar 2.4 Capaian Kinerja Utama Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan (Persen)

Grafik menunjukkan perkembangan persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dan sesuai dengan kewenangan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun **2020**, capaian masih sangat rendah yaitu hanya sebesar **13,24%**. Rendahnya capaian pada tahun tersebut disebabkan karena kewenangan pengelolaan sistem irigasi masih berada di bawah **Balai Wilayah Sungai (BWS)**, sehingga keterlibatan dan intervensi langsung dari pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dan penyediaan air irigasi masih terbatas.

Namun mulai tahun **2021**, setelah terjadi penyesuaian kewenangan dan pengelolaan sistem irigasi beralih sebagian atau sepenuhnya ke daerah, terjadi **lonjakan signifikan** dalam capaian ketersediaan air irigasi, mencapai **100%**. Capaian

maksimal ini berhasil dipertahankan secara konsisten hingga tahun **2024**, mencerminkan adanya perbaikan manajemen irigasi, sinergi kelembagaan, serta optimalisasi sumber daya air untuk mendukung produktivitas pertanian rakyat. Konsistensi capaian 100% selama empat tahun terakhir menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan air irigasi yang memadai bagi petani, serta keberhasilan dalam pelaksanaan program irigasi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.



Gambar 2.5 Capaian Kinerja Utama Persentase Penyelenggaraan Penetapan, Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Persen)

Grafik menunjukkan capaian persentase penyelenggaraan penetapan, perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang selama periode 2020 hingga 2024.

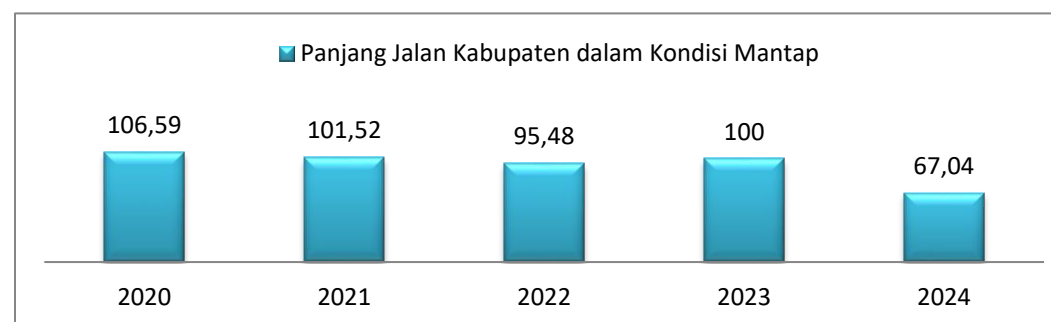
Pada tahun **2020 hingga 2022**, capaian berada pada angka **100%**, menunjukkan bahwa seluruh target peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait tata ruang telah berhasil disusun dan ditetapkan sesuai rencana.

Namun, pada tahun **2023**, terjadi penurunan capaian menjadi **83,33%**. Hal ini disebabkan karena dari **empat perda/raperda** yang ditargetkan, hanya **tiga** yang berhasil ditetapkan atau diselesaikan, yaitu:

1. Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah,
2. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mempawah, dan
3. Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) RDTR Kawasan Pelabuhan Kijing Sungai Kuyit.

Satu target lainnya belum tercapai pada tahun tersebut, sehingga berpengaruh terhadap penurunan persentase. Pada tahun **2024**, capaian kembali meningkat menjadi **100%**, menunjukkan bahwa kekurangan pada tahun sebelumnya telah diperbaiki dan seluruh dokumen serta kebijakan tata ruang yang direncanakan telah terselenggara dengan baik. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola tata ruang secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai regulasi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan administratif dan teknis di lapangan yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor.

Untuk capaian indikator kinerja Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, ditampilkan pada grafik



Gambar 2.6 Capaian Kinerja Utama Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Persen)

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan **panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi mantap** selama periode 2020 hingga 2024.

Pada tahun **2020**, kondisi jalan mantap tercatat sepanjang **106,59 km**, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga **95,48 km** pada tahun **2022**. Namun pada tahun **2023**, terjadi peningkatan kembali menjadi **100 km**, mencerminkan upaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang cukup berhasil.

Tahun **2024** menunjukkan penurunan signifikan menjadi **67,04 km**. Penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan kualitas jalan secara langsung, melainkan karena adanya pemutakhiran data yang merujuk pada perubahan dasar penghitungan.

Sebelumnya, data kemantapan jalan mengacu pada **Keputusan Bupati Mempawah Nomor 108 Tahun 2017** tentang Penetapan Ruas–Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dengan total panjang **632,073 km**. Pada tahun 2024, data tersebut diperbarui menjadi **681,400 km**, sehingga total panjang jaringan jalan kabupaten meningkat. Penyesuaian ini mengakibatkan proporsi panjang jalan yang masuk kategori mantap berubah, meskipun kualitas aktual sebagian besar jalan belum tentu menurun. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan angka absolut jalan mantap, hal ini mencerminkan perubahan cakupan total data yang lebih luas dan akurat. Pemerintah daerah ke depan perlu menyesuaikan program peningkatan kualitas jalan agar dapat mengejar proporsi kemantapan yang sesuai dengan basis data terbaru.



Gambar 2.7 Capaian Kinerja Utama Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan (Persen)

Grafik menunjukkan perkembangan persentase akses layanan sanitasi (air limbah) pada permukiman perkotaan dan perdesaan selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Pada tahun **2020**, data belum tersedia karena indikator ini belum termasuk dalam indikator kinerja utama yang dilaporkan pada tahun tersebut. Dengan demikian, capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun berikutnya.

Mulai tahun **2021**, indikator ini mulai dimasukkan sebagai bagian dari pengukuran kinerja, dan capaian awal menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu **114,79%**. Capaian ini mencerminkan bahwa terdapat integrasi atau pembaruan data yang luas, termasuk kemungkinan adanya penduduk yang mengakses lebih dari satu jenis layanan atau pembaruan sistem penghitungan cakupan.

Pada tahun-tahun selanjutnya, capaian lebih stabil, yaitu:

- **100,09%** di tahun 2022,



- **102,05%** di tahun 2023, dan
- **100,4%** di tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan sanitasi telah tersedia secara luas dan merata di wilayah permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan. Angka di atas 100% dapat terjadi akibat sinkronisasi ulang data kependudukan, cakupan layanan, atau sistem pelaporan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan sanitasi yang aman dan layak sebagai bagian dari pelayanan dasar, serta sebagai upaya mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan. Untuk indikator kinerja kunci Rasio kepatuhan IMB kab/ kota pada tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak terdapat data yang valid, dan untuk Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi tidak ada data yang valid hal ini disebabkan oleh belum ada bagian seksi yang menangani jasa konstruksi.



Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2020 - 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
	2020	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.345.900	452.238.195	89,49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.656.274.694	16.132.525.795	96,86
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.084.400	44.268.000	94,02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.076.356	25.076.356	100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	52.474.625	52.474.625	100
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.773.003.747	1.607.632.447	90,67
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	29.981.775	29.981.775	100
Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	24.999.600	23.829.600	95,32
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.818.066.500	1.792.264.500	98,58
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	946.759.200	938.833.000	99,29
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	373.495.000	319.657.200	85,59
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	25.939.192.360	22.837.159.410	88,04
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1.125.000.000	1.009.839.637	89,76
Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	61.375.832.000	61.373.757.000	100
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.210.000.000	894.707.510	73,94
Program Peningkatan Jalan	8.692.000.000	6.536.787.480	75,24
Program Perencanaan Tata Ruang	78.499.900	77.948.100	99,3
Program Pemanfaatan Ruang	29.999.775	29.774.775	99,25

Sumber: Renstra DPUPR Kab. Mempawah Tahun 2020-2024



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	7.641.942.685	8.260.640.241	8.107.640.118	8.519.058.128	-	7.422.242.727	7.750.581.162	7.440.165.519	8.023.265.974	-	97,15	93,83	91,77	94,18
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	13.860.764.990	16.200.889.948	6.996.337.932	5.603.470.822	-	13.530.406.594	14.728.400.930	6.930.385.299	5.571.705.190	-	98,69	90,91	89,31	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	18.506.257.691	16.418.116.300	28.610.927.600	99.506.150.000	-	18.321.392.062	15.255.232.000	24.735.875.500	99.143.984.894	-	99,51	92,92	87,11	99,99
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAAHAN REGIONAL	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	398.420.000	-	-	-	-	100	-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	703.000.000	3.135.490.000	3.539.752.700	7.111.523.000	-	695.368.775	2.895.535.110	3.502.410.700	5.970.476.800	-	98,94	92,35	98,85	83,95
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	7.960.591.000	3.850.772.200	3.991.485.600	2.990.224.200	-	7.914.002.400	3.830.354.200	3.977.817.000	2.971.524.400	-	100	99,47	99,96	100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	28.632.243.700	9.434.735.100	29.097.154.147	-	-	28.455.705.600	9.376.484.100	28.832.439.800	-	-	100	99,38	99,95	-



PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	4.512.956.750	7.019.237.000	2.195.586.900	4.774.539.400	-	4.487.214.950	4.744.098.900	2.167.095.900	3.222.142.060	-	100	67,59	99,54	70,36
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	838.928.300	1.555.442.900	1.734.500.000	18.360.000.000	-	831.837.900	1.147.979.900	1.718.209.600	18.120.432.410	-	100	73,8	99,94	99,23
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	33.173.519.170	38.541.111.486	56.551.846.019	104.017.666.768	-	32.969.037.110	36.021.524.550	44.833.017.892	101.652.120.514	-	99,92	93,46	80,12	98,22
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	449.327.050	786.908.925	483.209.700	570.443.200	-	90.130.875	371.010.450	444.998.423	494.750.107	-	20,06	47,15	92,6	87,14

Sumber: Renstra DPUPR Kab. Mempawah Tahun 2020-2024, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	<i>Penataan Ruang</i>	<i>Pelayanan Penerbitan izin PBG</i>	<i>Masyarakat (Terutama yang akan mengurus dokumen untuk perizinan Persetujuan Bangunan Gedung)</i>

Sumber : Bidang Tata Ruang DPUPR Kab.Mempawah 2025

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam

penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah:

Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas PTSP	Pemberian perizinan untuk simbg	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam perizinan bangunan gedung
2	Kementerian PU	Pemberian dukungan anggaran	Terlaksananya progam yang sudah direncanakan
3	Kementerian ATR/BPN	Pendampingan terhadap peraturan tata ruang wilayah kabupaten	Terlaksananya RTRW dan RDTR Wilayah Kabupaten Mempawah

Sumber : Bidang Tata Ruang DPUPR Kab.Mempawah 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya

dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
1.	PDAM	Pengawasan kualitas Air Minum	Meningkatkan kualitas air minum

Sumber : Bidang Cipta Karya DPUPR Kab.Mempawah 2025

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui

kerjasama yang efektif dengan BUMD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya capaian kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan jalan	1. Masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak 2. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak 3. Pembangunan utilitas dan jaringan pipa pada badan jalan
		2. Belum terpenuhinya capaian kualitas jasa konstruksi	1. Masih rendahnya ketrampilan tenaga kerja jasa konstruksi

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		3. Belum terpenuhinya capaian pengelolaan sumberdaya air dan kinerja sistem drainase	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase2. Masih terdapat drainase yang rusak dan kurang terpelihara3. Terjadinya perubahan iklim mengakibatkan curah hujan cukup tinggi sehingga terjadi banjir4. Banyaknya bangunan liar diatas saluran air5. Adanya alih fungsi lahan di daerah hulu mengakibatkan daya serap air berkurang, sehingga debit air meningkat daya tampung terbatas6. Masih terdapat sarana dan prasarana sungai (tanggul, cekdam, groundsill, pintu air) dalam kondisi rusak/kritis yang belum tertangani7. Pendangkalan sungai
		4. Belum terpenuhinya capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan2. Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			3. Masih terdapat segmen rumah tangga yang belum memiliki sambungan rumah
		5. Belum terpenuhinya capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	<p>1. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p> <p>2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik</p> <p>3. Belum terdapat IPLT</p>
		6. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan bangunan gedung	<p>1. Masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung</p> <p>2. Masih terdapat bangunan gedung pemerintah yang belum memenuhi standar teknis</p> <p>3. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan/strategis lainnya</p>
		7. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan perencanaan,	1. Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	

Sumber : Data dan Informasi Bidang Sumber daya air, Tata Ruang, Cipta karya, Bina marga DPUPR Kab. Mempawah 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Mempawah dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Isu global terkini terkait infrastruktur Indonesia mencakup beberapa aspek penting seperti pembiayaan, keberlanjutan, konektivitas, dan kesenjangan antar wilayah. Selain itu, ada juga isu

terkait perubahan iklim dan urbanisasi yang menuntut adaptasi dalam pembangunan infrastruktur. Berikut beberapa isu global yang relevan dengan infrastruktur Indonesia:

1. Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan:

- **Keterbatasan Dana:**

Kolaborasi public-private partnership (PPP) dan green financing.

2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Infrastruktur:

- **Infrastruktur Berkelanjutan:**

Adaptasi infrastruktur terhadap bencana iklim (banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut).

- **Adaptasi Perubahan Iklim:**

Green infrastructure / infrastruktur rendah karbon.

3. Sustainable Development Goals (SDGs):

Terutama Tujuan 6 (Air Bersih & Sanitasi), 9 (Infrastruktur, Industri & Inovasi), dan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).

4. Urbanisasi Global:

- **Pertumbuhan Kota:** Tekanan terhadap infrastruktur dasar (air, sanitasi, transportasi) akibat urbanisasi cepat.

5. Isu Strategis Lainnya:

- **Tata Ruang:** Tata ruang yang terpadu menjadi dasar pembangunan infrastruktur yang tepat.

- **Pelestarian Lingkungan:** Pembangunan infrastruktur harus seimbang dengan pelestarian lingkungan.

2.2.2.2 Isu Nasional

Pengisian isu nasional dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan dengan mengidentifikasi isu yang relevan, dapat berasal dari kebijakan pemerintah pusat, hasil evaluasi pembangunan, serta perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi di tingkat nasional. Sumber informasi yang digunakan dalam identifikasi ini meliputi dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RPJPN, Renstra K/L, dan data makro ekonomi dan sosial. Setelah isu nasional teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memetakan relevansinya dengan kondisi daerah, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Adapun Isu

nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

1. Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan:
 - Pembangunan jalan nasional, tol, pelabuhan, dan bandara untuk menghubungkan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
2. Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan:
 - Akses air bersih, sanitasi layak, irigasi pertanian, dan listrik desa.
3. Ibu Kota Nusantara (IKN):
 - Pengalihan pusat administrasi menuntut pembangunan infrastruktur pendukung skala besar di Kalimantan.
4. Transportasi Publik Berkelanjutan:
 - Integrasi moda transportasi.
5. Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan:
 - Rehabilitasi jaringan irigasi, waduk, embung, dan jalan produksi pertanian.
6. Penanganan Permukiman Kumuh:
 - pengelolaan air limbah.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu regional dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merujuk pada tantangan dan prioritas yang dihadapi di level provinsi. Isu ini dapat mencakup masalah seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan infrastruktur, atau penguatan sektor ekonomi unggulan lokal. Identifikasi isu regional dilakukan dengan memperhatikan kondisi spesifik daerah, hasil evaluasi capaian pembangunan, serta kebutuhan masyarakat setempat. Berikut ini adalah isu regional Dinas yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah:

1. Keterbatasan Anggaran untuk Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai
2. Keterbatasan Sumber Air Baku
3. Ketiadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
4. Pertumbuhan Lalu Lintas dan Pelanggaran Muatan Berlebih

5. Kesesuaian Ruas Jalan dengan Standar Teknis
6. Kekurangan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan
7. Ketiadaan Seksi Khusus Jasa Konstruksi
8. Kepatuhan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Konstruksi

2.2.2.4 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Tersedianya fasilitas dan infrastruktur dapat mengembangkan potensi di sektor industri perdagangan dan di sejalan dengan izin perluasan usaha.
2. Adanya kawasan industri yang tertata dengan memaksimalkan kepastian hukum dan ruang bagi pengembangan usaha industri.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Mempawah dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perumusan Isu Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Tersedianya fasilitas dan infrastruktur dapat mengembangkan potensi di sektor industri perdagangan dan di sejalan dengan izin perluasan usaha.	1. Belum terpenuhinya capaian kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Rendahnya kualitas air bersih.	1. Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan: Kolaborasi public-private partnership (PPP) dan green financing.	1. Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan: Pembangunan jalan nasional, tol, pelabuhan, dan bandara untuk menghubungkan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).	1. Keterbatasan Anggaran untuk Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	1. Keterbatasan anggaran pembiayaan yang memerlukan pemilahan skala prioritas dan pencarian sumber-sumber pendanaan lainnya selain dari APBD Kabupaten Mempawah.
2. Adanya kawasan industri yang tertata dengan memaksimalkan kepastian hukum dan ruang bagi pengembangan usaha industri.		2. Kurangnya sarpras pengelolaan air limbah, baik domestik maupun non domestic.	2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Infrastruktur: Adaptasi infrastruktur terhadap bencana iklim (banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut), Green infrastructure / infrastruktur rendah karbon.	2. Infrastruktur Dasar di Kawasan Perdesaan: Akses air bersih, sanitasi layak, irigasi pertanian, dan listrik desa.	2. Keterbatasan Sumber Air Baku	2. Menurunnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan akibat dari perubahan iklim, anomali cuaca, bencana banjir, dan overload atau pembebanan yang berlebihan pada ruas jalan tersebut.
		3. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang.	3. Sustainable Development Goals (SDGs): Terutama Tujuan 6 (Air Bersih & Sanitasi), 9 (Infrastruktur,	3. Ibu Kota Nusantara (IKN): Pengalihan pusat administrasi menuntut pembangunan infrastruktur	3. Ketiadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	3. Minimnya ketersediaan database terkait pelaksanaan tupoksi keciptakaryaan yang meliputi Bangunan Gedung, Rumah

			Industri & Inovasi), dan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).	pendukung skala besar di Kalimantan.		Negara Golongan III, drainase, jalan lingkungan, jaringan air bersih, hingga data terkait PBG/SLF
		4. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air dan jaringan air minum.	4.Urbanisasi Global: Tekanan terhadap infrastruktur dasar (air, sanitasi, transportasi) akibat urbanisasi cepat.	4.Transportasi Publik Berkelanjutan: integrasi moda transportasi.	4. Pertumbuhan Lalu Lintas dan Pelanggaran Muatan Berlebih	4. Masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten mempawah yang aksesibilitas yang keterjangkauannya belum maksimal.
		5. Kurangnya integrasi infrastruktur dan utilitas.	5.Isu Strategis Lainnya: Tata Ruang Pelestarian Lingkungan	5.Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan: Rehabilitasi jaringan irigasi, waduk, embung, dan jalan produksi pertanian.	5. Kesesuaian Ruas Jalan dengan Standar Teknis	5. Beberapa Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten Mempawah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasikan dengan OSS RBA, sehingga diperlukan dukungan pendanaan dari APBD dan sumber lainnya guna mendukung investasi dan percepatan Pembangunan wilayah Kabupaten Mempawah.

				6. Penanganan Permukiman Kumuh: pengelolaan air limbah.	6. Kekurangan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan	6. Keterbatasan prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan tupoksi yang perlu diatasi dengan penyediaan sarpras penunjang untuk meningkatkan kinerja setiap bidang.
					7. Ketiadaan Seksi Khusus Jasa Konstruksi	7. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Dinas PUPR Kabupaten Mempawah yang perlu diatasi dengan penambahan jumlah personal dan pengembangan kompetensi SDM melalui diklat dan pelatihan-pelatihan teknis terkait.
					8. Kepatuhan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Konstruksi	8. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Mempawah 2025-2029, RENSTRA KEMEN PU, KLHS RPJMD KAB.MEMPAWAH 2025-2029

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah disajikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran pembiayaan yang memerlukan pemilahan skala prioritas dan pencarian sumber-sumber pendanaan lainnya selain dari APBD Kabupaten Mempawah.
2. Menurunnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan akibat dari perubahan iklim, anomali cuaca, bencana banjir, dan overload atau pembebanan yang berlebihan pada ruas jalan tersebut.
3. Minimnya ketersediaan database terkait pelaksanaan tupoksi keciptakarya yang meliputi Bangunan Gedung, Rumah Negara Golongan III, drainase, jalan lingkungan, jaringan air bersih, hingga data terkait PBG/SLF.
4. Masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten mempawah yang aksesibilitas yang keterjangkauannya belum maksimal.
5. Beberapa Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten Mempawah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasikan dengan OSS RBA, sehingga diperlukan dukungan pendanaan dari APBD dan sumber lainnya guna mendukung investasi dan percepatan Pembangunan wilayah Kabupaten Mempawah.
6. Keterbatasan prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan tupoksi yang perlu diatasi dengan penyediaan sarpras penunjang untuk meningkatkan kinerja setiap bidang.



7. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Dinas PUPR Kabupaten Mempawah yang perlu diatasi dengan penambahan jumlah personal dan pengembangan kompetensi SDM melalui diklat dan pelatihan-pelatihan teknis terkait.
8. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Mempawah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Mempawah dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan

indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia.

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur dan Indeks Ketahanan Daerah.

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah berperan dalam mendukung misi ke-3, tujuan *Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan Meningkatnya ketahanan daerah*, dan sasaran *Meningkatkan pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik, dan Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan* dari RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD

tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur	42	43,72	45,23	46,26	47,29	48,23	
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan		1. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	42%	43,72%	45,23%	46,26%	47,29%	48,32%	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	50%	52%	55%	60%	61%	63%	
		3. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih)	76%	76%	76,50%	77%	77,50%	78%	
		4. Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	70%	72%	74%	76%	79%	81%	
		5. Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase panjang saluran yang melayani jaringan irigasi	56%	58%	60%	62%	64%	66%	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		6. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	44%	44%	56%	56%	67%	67%	
		7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	73	73,50	74	74,50	75	75,50	

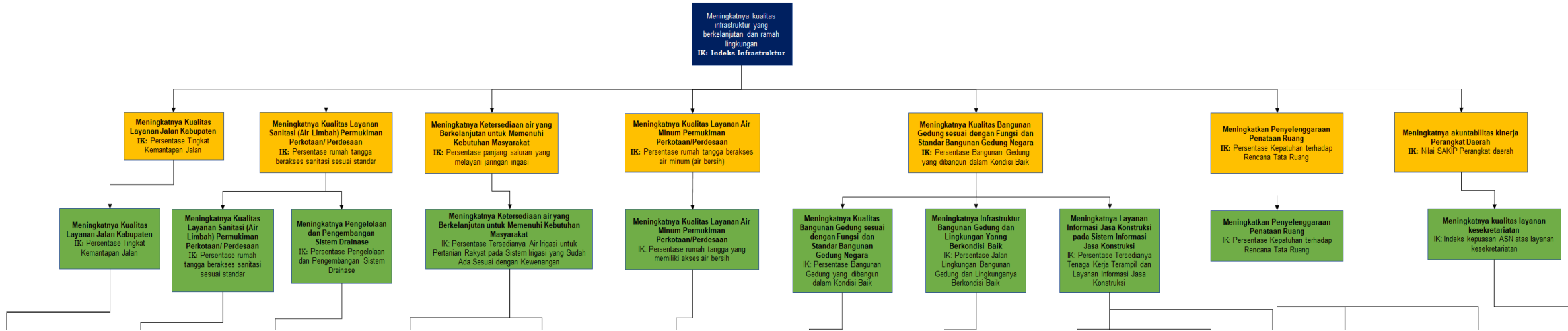
Sumber : Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah Tahun 2025

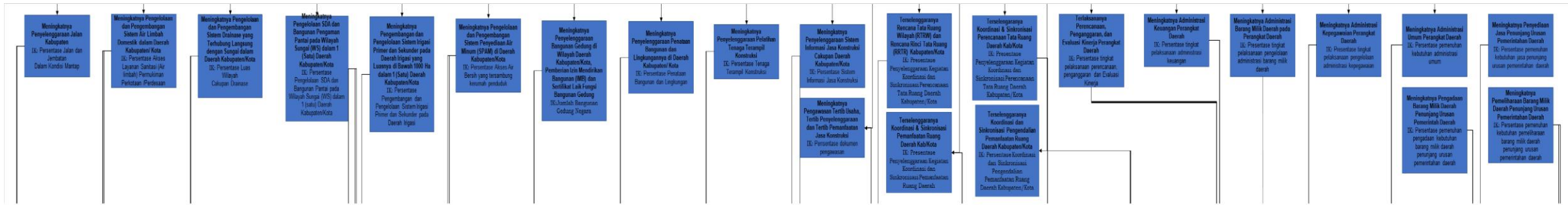
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai pohon kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk bagian pohon kinerja untuk memuat semua ke dalam Resnstra dari mulai input, output, outcome, dan tujuan maka akan dibagi per halaman :

1. Halaman 42: (Bagian Atas Pohon Kinerja) untuk sasaran dan program.
2. Halaman 43: (Bagian Tengah Pohon Kinerja) untuk kegiatan.
3. Halaman 44: (Bagian Bawah Pohon Kinerja) untuk sub kegiatan.







Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1		Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	
2	1. Akurasi data mempengaruhi dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan serta penentuan prioritas penanganan jalan Kabupaten.	Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	1. Meningkatkan Kualitas Data Base Jalan.
	2. Memprioritaskan Penanganan Kondisinya Rusak Ringan dan Rusak Berat Menjadi Baik guna meningkatkan kemantapan jalan dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara.		2. Memprioritaskan Penanganan Ruas Jalan Yang Kondisinya Rusak Ringan dan Rusak Berat Menjadi Baik.

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
	3. Pemeliharaan jalan dalam kondisi Baik dan Sedang dapat menjaga kondisi jalan tetap mantap serta biaya penanganan yang lebih rendah.		3. Mempertahankan Kondisi Baik dan Sedang Sehingga Tidak Terjadi Penurunan Kondisi.
	4. Akurasi data mempengaruhi dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan serta penentuan prioritas penanganan jembatan Kabupaten.		4. Memperkuat Data Base Jembatan.
	5. Keterbatasan biaya menjadikan mengharuskan penentuan prioritas penanganan jembatan yang akurat.		5. Memprioritaskan Jembatan Yang Kondisinya Rusak.
	6. Desain jembatan yang sesuai standar dapat memperpanjang umur rencana jembatan.		6. Pembangunan Maupun Penggantian Jembatan Sesuai Standar Kebutuhan.
3	1. Belum optimalnya dukungan target bangunan sesuai dengan standar perencanaan bangunan gedung dan umur bangunan Gedung.	2. Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	1. Meningkatkan kualitas database bangunan gedung.
	2. Belum optimalnya dukungan target bangunan sesuai dengan standar perencanaan bangunan gedung dan umur bangunan gedung.		2. Prioritas pembangunan gedung sarana prasanana aparatur.

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
	3. Belum optimalnya dukungan penganggaran pemeliharaan bangunan gedung sesuai database bangunan dan periodik pemeliharaan bangunan.		3. Pemeliharaan bangunan gedung secara berkala.
4	1. Belum optimalnya aplikasi pendukung penyimpanan data elektronik untuk bidang Air Bersih dan Air Minum.	3. Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	1. Meningkatkan kualitas Database Air Bersih dan Air Minum.
	2. Belum optimalnya dukungan penganggaran untuk pelayanan standar air minum masyarakat di Kabupaten Mempawah.		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih dan air minum.
	3. Belum optimalnya dukungan Penganggaran pemeliharaan bangunan sarana pengolahan air bersih dan air minum.		3. Pemeliharaan bangunan sarana pengelolaan air bersih.
5	1. Belum optimalnya aplikasi pendukung penyimpanan data elektronik untuk bidang sanitasi.	4. Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	1. Meningkatkan kualitas Database Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan.
	2. Kurangnya akses aman sanitasi untuk permukiman di Kabupaten Mempawah.		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan.

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
6	1. Perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang pesat, pencemaran air, infrastruktur yang tidak memadai, serta kurangnya kesadaran dan pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya air.	5. Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	1. Meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan rawa serta mengendalikan banjir dan melakukan konservasi sumber daya air.
7	1. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Bidang Tata Ruang.	6. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja Bidang Tata Ruang.
	2. Keterbatasan jumlah aparatur Bidang Tata Ruang dan Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang dan pemetaan kepada aparatur Bidang Tata Ruang.		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang profesional di Bidang Tata Ruang.
	3. Kurang tersosialisasinya Rencana Tata Ruang kepada masyarakat secara luas.		3. Penyediaan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Mempawah.
	4A. Pesatnya Dinamika Pembangunan akibat multiplier effect dari adanya 2 (dua) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kab. Mempawah.		4. Peningkatan kualitas dan kuantitas Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang agar seiring dengan perkembangan sarana prasarana wilayah, isu-isu strategis pembangunan wilayah serta melibatkan/ menjaring aspirasi

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
			seluruh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah.
	4B. Belum semua wilayah di Kabupaten Mempawah sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW untuk disusun dan ditetapkan RDTRnya.		
	5. Belum optimalnya dukungan penganggaran bagi Forum Penataan Ruang dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.		5. Optimalisasi peran Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Sumber : Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah Tahun 2025

3.2.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
<i>Fondasi Infrastruktur Dasar</i>	<i>Intervensi Infrastruktur Air dan Sanitasi</i>	<i>Penguatan Jaringan Irigasi dan Tata Ruang</i>	<i>Perluasan Cakupan dan Interkonektivitas</i>	<i>Konsolidasi dan Keberlanjutan</i>
1. Rehabilitasi Jalan Rusak Parah (jalan kabupaten, penghubung desa)	1. Pembangunan Instalasi Air Bersih - SPAM skala menengah di kecamatan padat	1. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru dan Rehabilitasi Saluran Lama - Wilayah pertanian utama (misal: Toho, Anjongan)	1. Integrasi Sistem Air Bersih Antarwilayah - Interkoneksi SPAM antar desa dan kecamatan	1. Pemeliharaan dan Audit Kinerja Infrastruktur
2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala kecil dan komunal di wilayah krisis air	2. Penyediaan Akses Sanitasi Aman - MCK komunal dan septic tank individual berbasis masyarakat	2. Implementasi Tata Ruang Berbasis Data - Penertiban permukiman liar dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	2. Perluasan Akses Sanitasi Aman hingga 100% Rumah Tangga	2. Digitalisasi Data Infrastruktur dan Tata Ruang
3. Pendataan dan Penataan Tata Ruang Wilayah - Pemetaan ulang kawasan rawan banjir, permukiman kumuh, dan area pertanian	3. Pembangunan Gedung Publik Baru - Puskesmas, sekolah, dan balai desa di wilayah terpencil	3. Peningkatan Jalan Strategis - Jalan menuju pelabuhan, pasar, dan sentra ekonomi lokal	3. Pembangunan Jalan Alternatif dan Jalur Evakuasi - Daerah rawan bencana atau padat lalu lintas	3. Pembangunan Gedung Pemerintah Modern dan Pusat Layanan Terpadu
4. Audit Gedung/Bangunan Negara - Fokus pada gedung pemerintah dan kantor layanan publik	4. Perbaikan dan Peningkatan Jalan Betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan jalan penghubung desa-kecamatan	4. Gedung Negara Ramah Lingkungan - Rehabilitasi dengan prinsip hemat energi dan tahan bencana	4. Normalisasi Sungai Besar dan Saluran Primer - Sungai Mempawah dan anak sungai utama	4. Revitalisasi Irigasi dan Sistem Air Bersih Berbasis Smart Monitoring
5. Identifikasi Saluran Irigasi dan Sungai Kritis - Pendataan dan studi teknis jaringan irigasi dan sungai yang perlu normalisasi	5. Mulai Pekerjaan Normalisasi Sungai Kecil - Prioritas sungai penyebab banjir musiman di daerah rendah	5. Pembangunan Sistem Drainase Kota dan Desa	5. Penyusunan Zonasi Industri, Permukiman, dan Konservasi	5. Evaluasi Tata Ruang Wilayah dan Revisi Jika Diperlukan

Rencana Penyelesaian Masalah Infrastruktur (Jika Terjadi Kendala)				
URUSAN	MASALAH	RENCANA PENYELESAIAN		
Jalan	Jalan rusak karena banjir atau overkapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Audit teknis dan klasifikasi kerusakan - Perencanaan anggaran darurat dan swakelola - Pemilihan material tahan cuaca ekstrem 		
Gedung Negara	Gedung tidak layak pakai atau terbengkalai	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi bertahap - Konsolidasi fungsi (penggabungan layanan) - Evaluasi kebutuhan dan distribusi gedung 		
Akses Air Bersih	SPAM tidak optimal, debit air rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber air alternatif (sumur dalam, hujan) - Pembangunan reservoir cadangan - Monitoring kualitas dan debit 		
Sanitasi	Banyak rumah tanpa septic tank aman	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan stimulan pembangunan tangki septik - Program edukasi sanitasi sehat - Kemitraan dengan NGO/Wash sektor 		
Irigasi	Irigasi tersumbat, bocor, atau tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan saluran dan skema pemeliharaan berkala - Keterlibatan kelompok tani sebagai operator lokal 		
Normalisasi Sungai	Sedimentasi tinggi, banjir tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Normalisasi rutin dan penanaman vegetasi bantaran - Larangan bangunan di sempadan sungai - Early warning system lokal 		
Tata Ruang Wilayah	Konflik zonasi atau pembangunan tidak sesuai rencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum dan pengawasan PBG - Revisi RDTR berbasis kebutuhan dan data baru - Konsultasi publik dan partisipatif 		

Sumber : Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah Tahun 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	1. Memenuhi kebutuhan dalam menyusun rencana umum, rencana detail, dan dokumen perencanaan lainnya terkait pembangunan infrastruktur.	1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah.	1.a Menegakan aturan terkait penggunaan air dan perlindungan sumber daya air.	
	2. Meningkatkan pelaksanaan berbagai jenis pekerjaan konstruksi, mulai dari jalan, jembatan, bangunan gedung, hingga penataan ruang.	2. Membangun Infrastruktur Hijau yang Ramah Lingkungan.	1.b Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan air berkelanjutan dan perlindungan sumber daya air.	
	3. Meningkatkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan, memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.	3. Memperkuat Konektivitas Infrastruktur.	1.c Meningkatkan kemampuan petani untuk bisa berdaya guna dan berhasil guna.	
	4. Memastikan proses perizinan dan regulasi	4. Mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Infrastruktur Cerdas dan Hijau.	2.a Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan modern sebagai	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	terkait kegiatan konstruksi dan penataan ruang.		penunjang kinerja Bidang Tata Ruang terutama dalam menunjang kualitas pelayanan publik.	
	5.Meningkatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan konstruksi dan penataan ruang.		2.b Meningkatkan jumlah dan kualitas aparatur yang profesional di Bidang Tata Ruang dan telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Peraturan Zonasi, PPNS Penataan Ruang , Pelatihan Sistem Informasi Geografis/GIS dan lain sebagainya.	
			2.c Menyediakan sistem informasi tata ruang yang handal dan dapat berfungsi mensosialisasikan peraturan terkait tata ruang, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang (pengaduan masyarakat terkait pelanggaran, sekaligus dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Bidang Tata Ruang (informasi arahan lahan).	
			2.d Meningkatkan kualitas dan kuantitas Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rinci tata ruang agar seiring dengan perkembangan sarana prasarana wilayah, isu-isu strategis pembangunan wilayah serta melibatkan/menjaring aspirasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			seluruh stakeholders pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah.	
			2.f Mengoptimalkan Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Mempawah dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.	
			3.a Pemutahiran database Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan.	
			3.b Mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan standar Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan.	
			4.a Pemutahiran database bangunan gedung per tahun.	
			4.b Pembangunan secara bertahap dengan target bangunan sesuai dengan standar perencanaan bangunan gedung dan umur bangunan gedung.	
			4.c Penganggaran pemeliharaan bangunan gedung sesuai database bangunan dan periodik pemeliharaan bangunan.	
			5.a Pemutahiran database jaringan air bersih dan air minum.	
			5.b Mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan standar air minum masyarakat.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			5.c Penganggaran pemeliharaan bangunan sarana pengolahan air bersih dan air minum.	
			6.a Pemutahiran Data Base Jalan Per tahun.	
			6.b Pemilihan Konstruksi Yang Lebih mapan Sehingga Umur Rencana Dapat dicapai Sehingga Dapat Meminimalkan Biaya Pemeliharaan.	
			6.c Memperkuat Aspek Pemeliharaan Baik Yang Dilakukan Pihak Ketiga Maupun Yang dilakukan Secara Swakelola.	
			6.d Pemutahiran Data Base Jembatan Per tahun.	
			6.e Penanganan Pemeliharaan Sesuai Dengan Kebutuhan melalui kegiatan swakelola dan pihak ketiga.	
			6.f Memperkuat Aspek Perencanaan Untuk Pembangunan Jembatan Baru atau Pengganti.	

Sumber : Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (SASARAN PROGRAM)	OUTPUT (SASARAN KEGIATAN)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik.	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan				Indeks Infrastruktur		
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan.		1. Meningkatkan Kualitas Layanan Jalan Kabupaten			Persentase Tingkat Kemantapan Jalan		
		2. Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara			Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		
		3. Meningkatkan Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan			Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih)		
		4. Meningkatkan Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan			Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar		
		5. Meningkatkan Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat			Persentase panjang saluran yang melayani jaringan irigasi		
		6. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang			Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang		

		7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat daerah		
			Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat		Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01 - Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
				Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	



				Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
				Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	1.03.03.2.01 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Air Bersih yang tersambung kerumah penduduk	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	



				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1.03.03.2.01.0031 -Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0032 -Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan		Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Akses Layanan Sanitasi (Air limbah) Permukiman Perkotaan /Perdesaan	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	



				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
				Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
				Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Luas Wilayah Cakupan Drainase	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
				Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	



				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
				Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara		Persentase Bangunan Gedung yang dibangun dalam Kondisi Baik	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya Infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungan Yangg Berkondisi Baik		Persentase Jalan Lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkunganya Berkondisi Baik	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan diKawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	



				Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten		Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
				Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan	
				Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	



				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
			Meningkatnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi		Persentase Tersedianya Tenaga Kerja Terampil dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	



				Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase dokumen pengawasan	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Terselenggaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	



				Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
				Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
				Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	



				Terselenggaranya Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Presentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar	
				Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
				Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terselenggaranya Koordinasi & Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Presentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	



				Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
				Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terseleenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan yang Sesuaidengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
				Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	



				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
				Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
				Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
				Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
				Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0014 - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	1.03.01 - PROGAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	



				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah Tahun 2025



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				265.396.200.147,00		341.942.645.304,00		342.794.645.304,00		347.756.645.304,00		351.021.145.304,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.670.456.743,00		10.925.796.100,00		11.097.796.100,00		11.264.796.100,00		11.604.296.100,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	73	73,50	8.670.456.743,00	74	10.925.796.100,00	74,5	11.097.796.100,00	75	11.264.796.100,00	75,5	11.604.296.100,00	1.03.0.00.0.00.01.00	00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.806.700,00		50.000.000,00		57.000.000,00		61.000.000,00		68.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	38.806.700,00	1	50.000.000,00	1	57.000.000,00	1	61.000.000,00	2	68.000.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			



	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.499.400,00		8.500.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	7.499.400,00	1	8.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	2	12.500.000,00		
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.020.800,00		7.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.020.800,00	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.144.600,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3	3	3.144.600,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		



Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.800,00		7.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.800,00	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00		
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.141.300,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	3	3.141.300,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.999.800,00		17.500.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	14.999.800,00	1	17.500.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.914.540.643,00		8.006.500.000,00		8.062.500.000,00		8.116.500.000,00		8.370.000.000,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68	75	7.914.540.643,00	78	8.006.500.000,00	80	8.062.500.000,00	82	8.116.500.000,00	85	8.370.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	500	650		675		675		700		725			



	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.811.491.843,00		7.900.000.000,00		7.950.000.000,00		8.000.000.000,00		8.250.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68	75	7.811.491.843,00	78	7.900.000.000,00	80	7.950.000.000,00	82	8.000.000.000,00	85	8.250.000.000,00		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				79.044.000,00		80.000.000,00		82.500.000,00		83.500.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	500	650	79.044.000,00	675	80.000.000,00	675	82.500.000,00	700	83.500.000,00	725	85.000.000,00		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				16.502.800,00		18.000.000,00		20.000.000,00		21.500.000,00		23.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	16.502.800,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	21.500.000,00	1	23.000.000,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/				7.502.000,00		8.500.000,00		10.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		



Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	7.502.000,00	1	8.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00	1	12.000.000,00		
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	25.000.000,00	1	140.000.000,00	1	145.000.000,00	1	160.000.000,00	1	170.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	25		25		25		25		25			
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00		



1.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	25	25.000.000,00	25	60.000.000,00	25	60.000.000,00	25	75.000.000,00	25	80.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				158.296.100,00		268.296.100,00		288.296.100,00		298.296.100,00		308.296.100,00		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	158.296.100,00	1	268.296.100,00	1	288.296.100,00	1	298.296.100,00	1	308.296.100,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35		50		60		70		75			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	900	900		900		900		900		900			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.212.000,00		4.212.000,00		4.212.000,00		4.212.000,00		4.212.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.212.000,00	1	4.212.000,00	1	4.212.000,00	1	4.212.000,00	1	4.212.000,00		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan				37.509.600,00		37.509.600,00		37.509.600,00		37.509.600,00		37.509.600,00		



Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	37.509.600,00	1	37.509.600,00	1	37.509.600,00	1	37.509.600,00	1	37.509.600,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.560.000,00		12.560.000,00		12.560.000,00		12.560.000,00		12.560.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.560.000,00	1	12.560.000,00	1	12.560.000,00	1	12.560.000,00	1	12.560.000,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.014.400,00		30.014.400,00		30.014.400,00		30.014.400,00		30.014.400,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.014.400,00	1	30.014.400,00	1	30.014.400,00	1	30.014.400,00	1	30.014.400,00		
1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35	50.000.000,00	50	100.000.000,00	60	120.000.000,00	70	130.000.000,00	75	140.000.000,00		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				24.000.100,00		24.000.100,00		24.000.100,00		24.000.100,00		24.000.100,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	900	900	24.000.100,00	900	24.000.100,00	900	24.000.100,00	900	24.000.100,00	900	24.000.100,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.393.000,00		1.805.000.000,00		1.860.000.000,00		1.890.000.000,00		1.920.000.000,00		
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	15.393.000,00	4	1.805.000.000,00	4	1.860.000.000,00	4	1.890.000.000,00	4	1.920.000.000,00		



Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		2		3		2		2		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		4		3		2		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		4		4		4		4		
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	850.000.000,00	4	850.000.000,00	3	850.000.000,00	2	850.000.000,00	
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan				7.276.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00	



Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	7.276.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	125.000.000,00	4	150.000.000,00		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		
1.03.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.117.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	8.117.000,00	2	30.000.000,00	3	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.000.000,00		475.000.000,00		500.000.000,00		525.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	400.000.000,00	36	475.000.000,00	36	500.000.000,00	36	525.000.000,00	36	550.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0		12		12		12		12			
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	36	400.000.000,00	36	425.000.000,00	36	450.000.000,00	36	475.000.000,00	36	500.000.000,00		



	dan Listrik yang Disediakan (Laporan)													
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.420.300,00		156.000.000,00		160.000.000,00		189.000.000,00		193.000.000,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	93.420.300,00	6	156.000.000,00	8	160.000.000,00	10	189.000.000,00	12	193.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23	23		23		25		27		29			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	38		38		38		38		38			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan				30.008.300,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		



Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	30.008.300,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.002.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	38	38	35.002.000,00	38	40.000.000,00	38	40.000.000,00	38	40.000.000,00	38	40.000.000,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.380.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	4.380.000,00	6	6.000.000,00	8	8.000.000,00	10	10.000.000,00	12	12.000.000,00		
1.03.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.030.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		



Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23	23	14.030.000,00	23	20.000.000,00	25	22.000.000,00	27	24.000.000,00	29	26.000.000,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				50.792.908.300,00		21.348.958.300,00		21.998.958.300,00		22.648.958.300,00		23.248.958.300,00		
Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan (%)	55	58	50.792.908.300,00	60	21.348.958.300,00	62	21.998.958.300,00	64	22.648.958.300,00	66	23.248.958.300,00	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	26,67	28,67		29,67		30,67		31,67		32,67			
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	14,09	15,59		16,09		16,29		16,79		17,29			
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	63,64	64,14		64,39		64,64		64,89		65,14			
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				42.824.908.300,00		16.048.958.300,00		16.498.958.300,00		16.948.958.300,00		17.348.958.300,00		
Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1	15	42.824.908.300,00	15	16.048.958.300,00	15	16.498.958.300,00	15	16.948.958.300,00	15	17.348.958.300,00		
	Panjang Sungai yang	27,99	62		62		68		75		81			



1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinormalisasi/Dires torasi (KM)													
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	2.094,00	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	2	15		17		17		17		17			
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	2	10		10		10		10		10			
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1	200		200		200		200		200			
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				2.051.500.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	2	15	2.051.500.000,00	17	2.000.000.000,00	17	2.000.000.000,00	17	2.000.000.000,00	17	2.000.000.000,00		
1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				48.908.300,00		48.958.300,00		48.958.300,00		48.958.300,00		48.958.300,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1	200	48.908.300,00	200	48.958.300,00	200	48.958.300,00	200	48.958.300,00	200	48.958.300,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				18.323.500.000,00		4.000.000.000,00		4.450.000.000,00		4.900.000.000,00		5.300.000.000,00		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dires torasi (KM)	27,99	62	18.323.500.000,00	62	4.000.000.000,00	68	4.450.000.000,00	75	4.900.000.000,00	81	5.300.000.000,00		



1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				19.340.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	2.094,00	2	19.340.000.000,00	2	7.000.000.000,00	2	7.000.000.000,00	2	7.000.000.000,00	2	7.000.000.000,00		
1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				210.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1	15	210.000.000,00	15	1.500.000.000,00	15	1.500.000.000,00	15	1.500.000.000,00	15	1.500.000.000,00		
1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				2.851.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	2	10	2.851.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00	10	1.500.000.000,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.968.000.000,00		5.300.000.000,00		5.500.000.000,00		5.700.000.000,00		5.900.000.000,00		
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0	7.968.000.000,00	16,5	5.300.000.000,00	17	5.500.000.000,00	17,5	5.700.000.000,00	18,5	5.900.000.000,00		
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1	15		15		15		15					
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	18	27		30		32		34					
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	1	15		17		16,5		16					
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0		17,5		19,5		20					
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1	5		2		2		2					



1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa				843.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1	15	843.000.000,00	15	1.000.000.000,00	15	1.000.000.000,00	15	1.000.000.000,00	15	1.000.000.000,00		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		1.100.000.000,00		1.150.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0	0	0,00	16,5	1.100.000.000,00	17	1.150.000.000,00	17,5	1.200.000.000,00	18,5	1.250.000.000,00		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				0,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.450.000.000,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	0	0,00	17,5	1.200.000.000,00	19,5	1.300.000.000,00	20	1.400.000.000,00	21,5	1.450.000.000,00		
1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa				5.775.000.000,00		1.150.000.000,00		1.100.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	1	15	5.775.000.000,00	17	1.150.000.000,00	16,5	1.100.000.000,00	16	1.050.000.000,00	16	1.050.000.000,00		
1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				1.350.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		950.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	18	27	1.350.000.000,00	30	650.000.000,00	32	750.000.000,00	34	850.000.000,00	36	950.000.000,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1	5	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				64.195.885.400,00		175.695.885.400,00		175.695.885.400,00		179.695.885.400,00		182.195.885.400,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman	Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih) (%)	75,31	75,50	64.195.885.400,00	76	175.695.885.400,00	76,50	175.695.885.400,00	77	179.695.885.400,00	77,50	182.195.885.400,00	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan

Perkotaan/Perdesaan													Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	76,04	76		76,50		77		77,50		78			
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				64.195.885.400,00		175.695.885.400,00		175.695.885.400,00		179.695.885.400,00		182.195.885.400,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	100	100	64.195.885.400,00	100	175.695.885.400,00	100	175.695.885.400,00	100	179.695.885.400,00	100	182.195.885.400,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	500	800		1.000		1.000		15.000		18.000			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	780	850		850		850		850		850			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan	0	5		5		5		5		5			



	dan Dipelihara (Unit)													
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	11	15		16		16		16		16			
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				19.163.681.400,00		19.163.681.400,00		19.163.681.400,00		19.163.681.400,00		19.163.681.400,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	780	850	19.163.681.400,00	850	19.163.681.400,00	850	19.163.681.400,00	850	19.163.681.400,00	850	19.163.681.400,00		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	3	0,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00	3	1.000.000.000,00		
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				45.032.204.000,00		45.032.204.000,00		45.032.204.000,00		45.032.204.000,00		45.032.204.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	11	15	45.032.204.000,00	16	45.032.204.000,00	16	45.032.204.000,00	16	45.032.204.000,00	16	45.032.204.000,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		90.000.000.000,00		90.000.000.000,00		90.000.000.000,00		90.000.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	100	100	0,00	100	90.000.000.000,00	100	90.000.000.000,00	100	90.000.000.000,00	100	90.000.000.000,00		



1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	5	0,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00		
1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Teroptimisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	5	0,00	5	10.000.000.000,00	5	10.000.000.000,00	5	10.000.000.000,00	5	10.000.000.000,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		8.500.000.000,00		8.500.000.000,00		12.500.000.000,00		15.000.000.000,00		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	500	800	0,00	1.000	8.500.000.000,00	1.000	8.500.000.000,00	15.000	12.500.000.000,00	18.000	15.000.000.000,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.613.102.500,00		19.113.102.500,00		19.113.102.500,00		19.113.102.500,00		19.113.102.500,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar (%)	68,90	72	4.613.102.500,00	74	19.113.102.500,00	76	19.113.102.500,00	79	19.113.102.500,00	81	19.113.102.500,00	1.03.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	88,55	72		74		76		79		81			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan				4.613.102.500,00		19.113.102.500,00		19.113.102.500,00		19.113.102.500,00		19.113.102.500,00		



Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	0	5	4.613.102.500,00	5	19.113.102.500,00	5	19.113.102.500,00	5	19.113.102.500,00	5	19.113.102.500,00		
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	512	275		275		275		275		275			
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yangdibangun (M ³ /Hari)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	512		512		512		512		512			
1.03.05.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				213.102.500,00		213.102.500,00		213.102.500,00		213.102.500,00		213.102.500,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang	0	2	213.102.500,00	2	213.102.500,00	2	213.102.500,00	2	213.102.500,00	2	213.102.500,00		



	dibangun (M ³ /Hari)													
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	512	275	4.400.000.000,00	275	4.400.000.000,00	275	4.400.000.000,00	275	4.400.000.000,00	275	4.400.000.000,00		
1.03.05.2.01.0025 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan				0,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M ³ /Hari)	0	5	0,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00		
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	512	0,00	512	1.000.000.000,00	512	1.000.000.000,00	512	1.000.000.000,00	512	1.000.000.000,00		
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0,00		11.500.000.000,00		11.500.000.000,00		11.500.000.000,00		11.500.000.000,00		
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	0	10	0,00	10	11.500.000.000,00	10	11.500.000.000,00	10	11.500.000.000,00	10	11.500.000.000,00		



1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	2	1	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				6.943.461.600,00		8.693.461.600,00		8.693.461.600,00		8.693.461.600,00		8.693.461.600,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (%)	60,38	68	6.943.461.600,00	74	8.693.461.600,00	78	8.693.461.600,00	79	8.693.461.600,00	80	8.693.461.600,00	1.03.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.943.461.600,00		8.693.461.600,00		8.693.461.600,00		8.693.461.600,00		8.693.461.600,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	2	6.943.461.600,00	3	8.693.461.600,00	2	8.693.461.600,00	1	8.693.461.600,00	1	8.693.461.600,00		
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	2.850	3.400		3.600		3.800		4.000		4.200			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	24	50		55		60		65		70			
	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5		5			



1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				6.523.461.600,00		6.523.461.600,00		6.523.461.600,00		6.523.461.600,00		6.523.461.600,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	2.850	3.400	6.523.461.600,00	3.600	6.523.461.600,00	3.800	6.523.461.600,00	4.000	6.523.461.600,00	4.200	6.523.461.600,00		
1.03.06.2.01.0022 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan				0,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan (Unit)	0	5	0,00	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00	5	750.000.000,00		
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	2	0,00	3	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	24	50	420.000.000,00	55	420.000.000,00	60	420.000.000,00	65	420.000.000,00	70	420.000.000,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				47.722.941.404,00		47.822.941.404,00		47.822.941.404,00		47.822.941.404,00		47.822.941.404,00		
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	49	52	47.722.941.404,00	55	47.822.941.404,00	60	47.822.941.404,00	61	47.822.941.404,00	63	47.822.941.404,00	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin				47.722.941.404,00		47.822.941.404,00		47.822.941.404,00		47.822.941.404,00		47.822.941.404,00		



Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3	47.722.941.404,00	3	47.822.941.404,00	3	47.822.941.404,00	3	47.822.941.404,00	3	47.822.941.404,00	3	47.822.941.404,00
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	35	37		37		37		37		37		37	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	112	150		150		150		150		150			
	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	0	2		2		2		2		2			
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				42.944.847.704,00		42.944.847.704,00		42.944.847.704,00		42.944.847.704,00		42.944.847.704,00		42.944.847.704,00



Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	35	37	42.944.847.704,00	37	42.944.847.704,00	37	42.944.847.704,00	37	42.944.847.704,00	37	42.944.847.704,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4.766.780.900,00		4.766.780.900,00		4.766.780.900,00		4.766.780.900,00		4.766.780.900,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3	4.766.780.900,00	3	4.766.780.900,00	3	4.766.780.900,00	3	4.766.780.900,00	3	4.766.780.900,00		
1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	0	2	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				11.312.800,00		11.312.800,00		11.312.800,00		11.312.800,00		11.312.800,00		



Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	112	150	11.312.800,00	150	11.312.800,00	150	11.312.800,00	150	11.312.800,00	150	11.312.800,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				25.742.500.000,00		34.742.500.000,00		34.742.500.000,00		34.742.500.000,00		34.742.500.000,00		
Meningkatnya Infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Persentase Jalan Lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkungan Berkondisi Baik (%)	50,28	53	25.742.500.000,00	55	34.742.500.000,00	57	34.742.500.000,00	58	34.742.500.000,00	60	34.742.500.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				25.742.500.000,00		34.742.500.000,00		34.742.500.000,00		34.742.500.000,00		34.742.500.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	95	159	25.742.500.000,00	159	34.742.500.000,00	159	34.742.500.000,00	159	34.742.500.000,00	159	34.742.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan	0	9		9		9		9		9			



	dan lingkungan (Orang)													
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				25.742.500.000,00		25.742.500.000,00		25.742.500.000,00		25.742.500.000,00		25.742.500.000,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	95	159	25.742.500.000,00	159	25.742.500.000,00	159	25.742.500.000,00	159	25.742.500.000,00	159	25.742.500.000,00		
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				0,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		9.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	0	9	0,00	9	9.000.000.000,00	9	9.000.000.000,00	9	9.000.000.000,00	9	9.000.000.000,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				56.480.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)	41,40	43,72	56.480.000.000,00	45,23	20.400.000.000,00	46,26	20.400.000.000,00	47,29	20.400.000.000,00	48,32	20.400.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				56.480.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	3	4	56.480.000.000,00	3	20.400.000.000,00	3	20.400.000.000,00	3	20.400.000.000,00	3	20.400.000.000,00		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1,528	3		0,5		0,5		0,5		0,5			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1,468	3,5		2,5		2,3		2,1		2			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,400	6		1,2		1,2		1,2		1,2			
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	4,282	13		2,5		2,4		2,3		2,2			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	21,667	10		6		5,8		5,6		5,4			
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	11	3		2		2		2		2			
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	3	5		2		2		2		2			
	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	3	0		3		3		3		3			
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	5	4		5		4,8		4,6		4,4			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	681,400	681,4		681,4		681,4		681,4		681,4			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		



Jalan dan Jembatan														
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	681,400	681,4	400.000.000,00	681,4	400.000.000,00	681,4	400.000.000,00	681,4	400.000.000,00	681,4	400.000.000,00		
1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan				0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	3	0	0,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				1.800.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,400	6	1.800.000.000,00	1,2	1.500.000.000,00	1,2	1.500.000.000,00	1,2	1.500.000.000,00	1,2	1.500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				7.087.500.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1,528	3	7.087.500.000,00	0,5	1.000.000.000,00	0,5	1.000.000.000,00	0,5	1.000.000.000,00	0,5	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				16.100.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	4,282	13	16.100.000.000,00	2,5	1.500.000.000,00	2,4	1.500.000.000,00	2,3	1.500.000.000,00	2,2	1.500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				1.470.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1,468	3,5	1.470.000.000,00	2,5	1.000.000.000,00	2,3	1.000.000.000,00	2,1	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan				5.775.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	3	5	5.775.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00		



1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				1.045.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	5	4	1.045.000.000,00	5	1.050.000.000,00	4,8	1.050.000.000,00	4,6	1.050.000.000,00	4,4	1.050.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				17.017.500.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	21,667	10	17.017.500.000,00	6	10.000.000.000,00	5,8	10.000.000.000,00	5,6	10.000.000.000,00	5,4	10.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	3	4	350.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				4.935.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	11	3	4.935.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00	2	800.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				0,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		
Meningkatnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tersedianya Tenaga Kerja Terampil dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi (%)	0	0	0,00	15	1.050.000.000,00	25	1.050.000.000,00	30	1.050.000.000,00	35	1.050.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	4,14	0		15		25		30		35			
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	0		100		100		100		100			
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				0,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	20	0,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00		



	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	10		10		10		10		10			
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	100	0,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	10	0,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	0	20	0,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	20	0,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	10	0,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0	2		2		2		2		2			
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0	2	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan(Dokumen)	0	10	0,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0	1	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	0	300		300		300		300		300			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	0	300	0,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		



Pemanfaatan Produk	Pemanfaatan Produk (Lembaga)													
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				234.944.200,00		2.150.000.000,00		2.180.000.000,00		2.325.000.000,00		2.150.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang (%)	44	44	234.944.200,00	56	2.150.000.000,00	56	2.180.000.000,00	67	2.325.000.000,00	67	2.150.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				68.487.200,00		350.000.000,00		380.000.000,00		525.000.000,00		350.000.000,00		
Terselenggaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	68.487.200,00	1	350.000.000,00	1	380.000.000,00	1	525.000.000,00	1	350.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	0	0		0		1		1		0			
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		0		0		1		0			
	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	0	0		100		100		100		100			
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				19.553.800,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	19.553.800,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				21.783.000,00		0,00		0,00		90.000.000,00		0,00		
Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	21.783.000,00	0	0,00	0	0,00	1	90.000.000,00	0	0,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				15.993.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	15.993.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		



Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	0	0,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				11.157.400,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	11.157.400,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		55.000.000,00		0,00		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	55.000.000,00	0	0,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata				0,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		



Ruang Daerah Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	0	0	0,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00	5	850.000.000,00		
	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	0	0		1		1		1		1			
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		



Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	0	0	0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				144.500.600,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi & Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	0	0	144.500.600,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00	12	450.000.000,00		
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1		1		1		1		1			
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				125.000.300,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1	1	125.000.300,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	1	320.000.000,00		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		



Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
Terlayannya permohonan dokumen Peretujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Peretujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	0	0	0,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				19.500.300,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1	1	19.500.300,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				21.956.400,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	0	0	21.956.400,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	0	0		1		1		1					
	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	0	0		1		1		1					



	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif administratif (Kasus)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	0	0		1		1		1		1			



1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				21.956.400,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	21.956.400,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.12.2.04.0007 - Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya tahapan kegiatan Penaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0011 - Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		



Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0014 - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

Sumber : SIPD Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Mempawah Tahun 2025-2029

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
2	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
3	1.03.03.2.01 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
4	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
5	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	1.03.02.2.01 - Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000	

			Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	%	42,00%	43,72%	45,23%	46,26%	47,29%	48,32%	
2	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	50,00%	52,00%	55,00%	60,00%	61,00%	63,00%	
3	Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih)	%	76,00%	76,00%	76,50%	77,00%	77,50%	78,00%	
4	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	%	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	79,00%	81,00%	
5	Persentase panjang saluran yang melayani jaringan irigasi	%	56,00%	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	
6	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	%	44,00%	44,00%	56,00%	56,00%	67,00%	67,00%	
7	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	
8	Indeks Infrastruktur	Indeks	42,00	43,72	45,23	46,26	47,29	48,32	

Sumber: Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	15,09	15,59	16,09	16,29	16,79	17,29	IKK PERMENDAGRI
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	63,89	64,14	64,39	64,64	64,89	65,14	IKK PERMENDAGRI
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	27,67	28,67	29,67	30,67	31,67	32,67	IKK PERMENDAGRI
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	IKK PERMENDAGRI
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70,00	72,00	74,00	76,00	79,00	81,00	IKK PERMENDAGRI
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK PERMENDAGRI
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	41,90	43,74	45,23	46,26	47,29	48,31	IKK PERMENDAGRI IKK RPJMD

8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	10,00	10,00	15,00	25,00	30,00	35,00	IKK PERMENDAGRI
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK PERMENDAGRI
IKK RPJMD									
1	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan	%	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00	IKK RPJMD
2	Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih)	%	75,50	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	IKK RPJMD
3	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	%	70,00	72,00	74,00	76,00	79,00	81,00	IKK RPJMD
4	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	%	60,57	68,00	74,00	78,00	79,00	80,00	IKK RPJMD
5	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	50,00	52,00	55,00	60,00	61,00	63,00	IKK RPJMD
6	Persentase Jalan Lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Berkondisi Baik	%	52,00	53,00	55,00	57,00	58,00	60,00	IKK RPJMD
7	Persentase Tersedianya Tenaga Kerja Terampil dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	10,00	10,00	15,00	25,00	30,00	35,00	IKK RPJMD
8	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	%	44,00	44,00	56,00	56,00	67,00	67,00	IKK RPJMD

Sumber: Data dan Informasi DPUPR Kab.Mempawah 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Mempawah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Mempawah periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah Tahun dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan,

sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



Pemerintah
Kabupaten Mempawah